

Kebutuhan dan tantangan akses jaminan kesehatan bagi penyandang tuna netra di Badan Sosial Mardi Wuto, Yogyakarta



Khaerani Arista Dewi - Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Latar Belakang

Banyak penyandang tuna netra tergolong sebagai masyarakat kurang mampu. Kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak menempatkan mereka pada kalangan ekonomi menengah ke bawah. Akses jaminan kesehatan perlu diprioritaskan pada kelompok tersebut.

Diskriminasi pada masyarakat tuna netra terjadi di beberapa sektor. Salah satunya pada akses jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan belum bisa menyeluruh didapat kaum tuna netra. Jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah saat ini terbagi menjadi Jamkesmas, Jamkesos, dan Jamkesda, namun tidak semua penyandang tuna netra dapat mengakses jaminan kesehatan[1].

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki program Jamkesus (Jaminan Kesehatan Khusus) untuk para difabel di Yogyakarta, namun program belum dirasa berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebutuhan dan tantangan akses kesehatan bagi tuna netra di Badan Sosial Mardi Wuto, Yogyakarta.

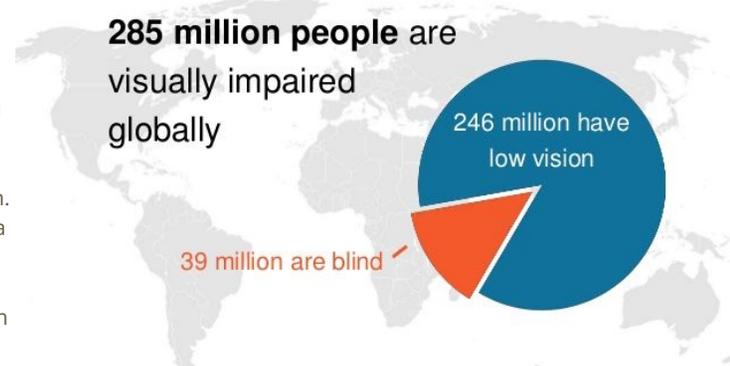
Metode

Penelitian menggunakan metode deskriptif, wawancara tidak terstruktur. Koresponden adalah anggota Badan Sosial Mardi Wuto yang dipilih secara sampel non-probabilitas. Wawancara dilakukan selama kurang lebih 2 minggu dengan korespondensi yang berbeda-beda.

Hasil

Mayoritas penyandang tuna netra tidak paham mengenai kesehatan. Health literacy pada penyandang tuna netra sangatlah rendah. Pandangan mereka mengenai kesehatan diri sendiri sering diabaikan. Beberapa koresponden diwawancara bahwa mereka masih mempercayai informasi kesehatan yang menyesatkan. Informasi kesehatan yang sering didapat terbatas melalui media seperti radio yang notabene

285 million people are visually impaired globally



berisi iklan / produk kesehatan tertentu atau melalui sosial media yang kebenarannya masih diragukan.

Pribadi yang tertutup. Perasaan rendah diri dan tertutup menjadi tantangan tersendiri untuk mengetahui kebutuhan kesehatan mereka. Para penyandang tuna netra lebih susah dalam mengekspresikan pendapatnya.

Informasi mengenai jaminan kesehatan bagi difabel tidak tersebar merata. Pemerintah sudah melakukan penyebaran informasi mengenai jaminan kesehatan untuk difabel, namun beberapa mengaku tidak memiliki jaminan kesehatan dan tidak tahu bagaimana mengurusnya.

Taraf ekonomi yang sangat rendah mempengaruhi keinginan untuk berobat. Pilihan pekerjaan yang sangat sedikit bagi penyandang tuna netra menjadi sebuah tantangan tersendiri. Pasalnya, hal itu mempengaruhi keinginan dalam mencari pengobatan. Mereka lebih memilih untuk bekerja yang mayoritas adalah tukang pijat daripada berobat ke dokter. Pilihan transportasi yang mahal dan keterbatasan mobilisasi (kurangnya pemandu) juga menjadikan akses kesehatan sulit diperoleh.

Pengurusan administratif Jamkesus yang lebih rumit daripada jaminan kesehatan lain. Meski Jamkesus Terpadu sudah dibuat, layanan Jamkesus dibuat satu atap secara komprehensif, namun demikian Jamkesus Terpadu tidak dilaksanakan setiap saat hanya di beberapa lokasi di setiap kabupaten/kota.

Pembahasan

Pemda DIY sebenarnya sudah mengupayakan pemenuhan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas di sektor kesehatan dengan terbentuknya Jamkesus. Meski begitu, masih diperlakukan pendataan dan verifikasi data secara berkala dan menyeluruh. Sosialisasi kesehatan akan lebih efektif bila melibatkan stakeholder terkait seperti LSM pendamping, organisasi penyandang disabilitas, dan tokoh masyarakat. Perlu dilakukan perbaikan dari layanan kesehatan untuk menyederhanakan proses birokrasi pelayanan kesehatan. Selain itu diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang responsif saat berinteraksi dengan penyandang tuna netra[2,3].

Kesimpulan

Penyandang tunanetra mengalami tantangan dalam mengakses jaminan kesehatan. Hambatan yang disoroti adalah ketidaktahuan mengenai ketersediaan jaminan kesehatan, administrasi yang rumit, biaya, transportasi, dan lain sebagainya. Dibutuhkan kerjasama pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat agar hak para penyandang tuna netra terpenuhi.

Referensi

1. Menanti Terbitnya Jamkesus [Internet]. [cited 24 Apr 2019]. Available: <https://www.solider.id/baca/729-menanti-terbitnya-jamkesus>
2. IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN KHUSUS (JAMKESUS) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN - Berita | BAPPEDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA [Internet]. [cited 24 Apr 2019]. Available: <http://bappeda.jogjapro.go.id/berita/detail/49-implementasi-jaminan-kesehatan-khusus-jamkesus-ebagai-salah-satu-upaya-pemenuhan-dan-perlindungan>
3. Open Education / Free online courses / Webinars [Internet]. [cited 24 Apr 2019]. Available: <http://iceh.lshrm.ac.uk/oer/>